

Dinamika Aktor Dalam *Collaborative Governance*: Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta

Sri Rahayu^{1*}, Hempri Suyatna², Nabila Arifani Arizka³

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

² Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Corresponding Author: srirahayu2001@mail.ugm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.463>

Article Info

Article History;

Received:

2024-11-25

Revised:

2024-12-20

Accepted:

2024-12-30

Abstrak: Tulisan ini mengeksplorasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui Program "Gandeng-Gendong", sebuah pendekatan tata kelola kolaboratif yang inovatif yang melibatkan: pemerintah daerah, korporasi, akademisi, komunitas, dan lingkungan. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Program ini beroperasi dalam kerangka norma, nilai, dan standar sosial, yang diformalkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Mengadopsi model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, Gandeng-Gendong telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengelola lingkungan. Namun, beberapa tantangan diidentifikasi, termasuk kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan, masalah alokasi sumber daya, dan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil ini, beberapa rekomendasi diusulkan: pemerintah daerah harus melanjutkan dukungan kebijakan, evaluasi yang transparan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas; perusahaan harus memperluas peluang pasar untuk produk lokal; Akademisi harus melibatkan siswa dalam pengabdian dan inovasi masyarakat; masyarakat harus memperkuat aksi kolektif dan jejaring sosial; dan lingkungan harus secara teratur memperbarui rencana program untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program. Program Gandeng-Gendong menawarkan model berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan, dengan potensi untuk menginformasikan kebijakan di wilayah lain, mendorong pembangunan dan kolaborasi inklusif.

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan; Tata Kelola Kolaboratif; Program Gandeng-Gendong.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu ketidakcukupan dalam pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan primer. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan yang bersifat massal dan parah pada umumnya terdapat di negara berkembang, namun terdapat bukti bahwa kemiskinan juga terjadi di negara maju, yang ditunjukkan oleh kelangkaan sumber daya tertentu serta memperhatikan standar hidup di suatu masyarakat (Shrider, 2024). Di negara berkembang, kemiskinan sangat terkait

dengan aspek struktural. Misalnya akibat sistem ekonomi yang tidak adil, praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), diskriminasi sosial, tidak adanya jaminan sosial dan sebagainya.

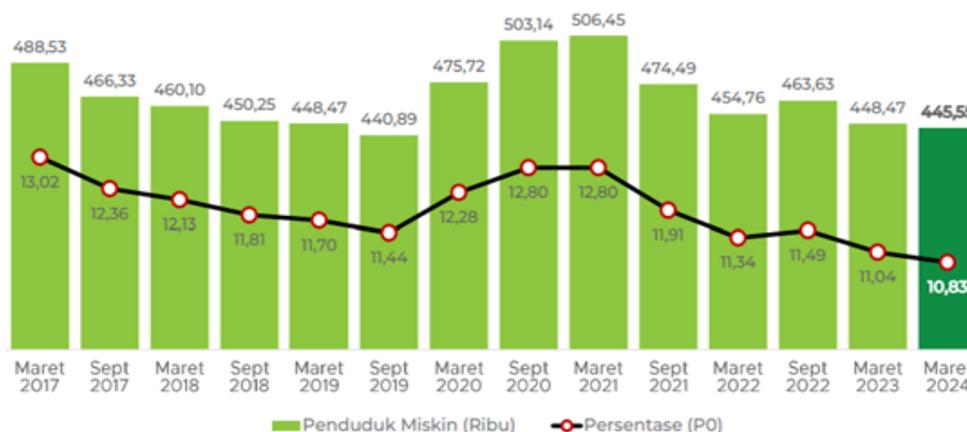
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa dengan persentase 11,04% pada Maret 2023. Tercatat adanya perubahan jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masuk dalam garis kemiskinan per kapita per bulannya sebesar Rp 602.437 atau naik dari periode sebelumnya senilai Rp 573.022 per kapita per bulan. Hal ini juga didukung dengan rendahnya tingkat UMP, tercermin dari adanya 3 kabupaten di DIY yang masuk dalam kategori 5 pendapatan terendah (Rohman & Suditomo, 2024).

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta



Salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta (Pemda DIY) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan DIY dibandingkan angka kemiskinan secara nasional, penurunan kemiskinan juga relatif lambat.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Di Yogyakarta 2017-2024



Sumber: BPS Provinsi Di Yogyakarta

Meskipun angka kemiskinan di Yogyakarta mengalami fluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan penurunan (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya dampak positif dari berbagai program pemberdayaan yang dilakukan. Salah satunya, *Yogyakarta Creative Hub*, yang dibangun untuk mewadahi pelaku-pelaku dalam industri kreatif dengan menyediakan fasilitas dan ruang serta mengintegrasikan keseluruhan kegiatan subsektor industri kreatif Indonesia. Selain sebagai pusat pelatihan, YCH juga sering menyelenggarakan berbagai event seperti *workshop*, festival, dan seminar yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif, teknologi, dan kewirausahaan.

Meskipun tantangan dalam mempertahankan penurunan angka kemiskinan masih tetap ada, pada akhirnya, pemerintah terus berupaya dengan menerapkan Program Gandeng-Gendong. Program tersebut dilaksanakan dengan prinsip *Collaborative Governance*, yang merupakan paradigma baru dengan penekanan pada peran berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik. Melalui penerapan program berbasis *Collaborative Governance*, proses tersebut dipastikan berjalan sesuai sistem yang dirancang secara logis dan terstruktur. Pendekatan ini membantu pengguna memahami cara menjalankan program demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun program lain yang diupayakan meliputi: Belabeli, Program *One Village One Product* (OVOP), dan sebagainya (AZ-ZAHRA, 2024).

Menurut Lai dalam penelitian Karmila S. Tampanguna dan kawan-kawan mengatakan bahwa "*Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative intections are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence*". Definisi ini menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui interaktivitas dan adanya saling ketergantungan (Tampanguma & Dkk, 2020).

Adanya undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda) mendorong munculnya proses transformasi otonomi daerah. Aturan ini direspon oleh pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu Program Gandeng Gendong. Adanya semangat gotong royong yang

mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan inovasi pengentasan kemiskinan menuju kemajuan Yogyakarta.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dengan Pendekatan pemerintah yakni dalam implementasi program “Gandeng Gendong” adalah inovasi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Inovasi program tersebut diluncurkan pada tanggal 10 April 2018 ini merupakan respon pemerintah Yogyakarta untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan beragam permasalahan perkotaan lainnya dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat.

Program Gandeng Gendong ini masuk dalam peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018. Program Gandeng Gendong ini adalah program kerjasama antara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara *stakeholder* pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya (Yogyakarta, 2018).

Dalam pelaksanaannya Gandeng Gendong melibatkan 5 K yaitu, Kota, Kampus, Korporasi, Kampung, dan Komunitas. Program Gandeng Gendong sebagai bentuk dari *community capacity building* dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya. Selain peran pemerintah, program ini juga melibatkan unsur 5K di antaranya Kampus, Korporasi, Komunitas, Kampung dan Kota (Pemerintah Kota Yogyakarta).

Kampus berperan dalam program Gandeng Gendong melalui aksi sosial, pengumpulan bantuan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran ini sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Program Gandeng-Gendong menunjukkan bahwa antara dunia pendidikan dengan menyalurkan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemerintah dibutuhkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Yogyakarta. Selain itu, korporasi juga terlibat dalam kesuksesan program yang digalang oleh pemerintah dengan menyediakan dana, barang, kebutuhan pokok, logistik, dan layanan lainnya.

Komunitas adalah kelompok masyarakat yang terbentuk dari berbagai latar belakang, seperti pekerja atau profesi tertentu, peminat hobi dan seni, pengamat isu sosial-ekonomi, budaya, atau perkumpulan lain yang memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat. Sebagai agensi, komunitas berperan dalam menyediakan wadah, asosiasi, dan forum untuk pengembangan usaha kecil, melakukan konsolidasi antar komunitas, serta mengusulkan kebutuhan untuk mendukung pengembangan usaha kecil. Selain itu, komunitas juga bertugas mempromosikan produk dalam Program Gandeng Gendong, termasuk mencantumkan logo program pada kemasan produk, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, dan berpartisipasi aktif dalam sosialisasi program.

Kampung merupakan wilayah atau komunitas masyarakat di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus utama dalam Program Gandeng Gendong untuk memberdayakan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan masyarakatnya. Sebagai agensi, kampung berperan dalam berbagai aktivitas, seperti mendata masyarakat kurang mampu, memetakan potensi lokal, memberikan rekomendasi dan penataan bagi usaha kecil, mendampingi pengembangan usaha kecil, hingga mempromosikan potensi yang dimiliki wilayahnya. Selain itu, kampung juga bertugas menjalin koordinasi antar kampung dalam satu wilayah untuk memastikan pelaksanaan Program Gandeng Gendong berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai salah satu elemen utama dalam Program Gandeng Gendong dengan membentuk forum di tingkat kota untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam merancang program tahunan dan *roadmap* kegiatan. BAPPEDA bertanggung jawab mengoordinasikan sinergi kegiatan dan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah, sementara Kasi Kesejahteraan menyusun kebijakan yang kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk pengambilan keputusan dan eksekusi oleh dinas terkait. Pemerintah juga memanfaatkan potensi daerah untuk mengarahkan kelompok sasaran program serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala demi keberhasilan pelaksanaannya.

Kolaborasi di antara aktor di dalam proses Pembangunan menarik untuk dicermati. Dalam banyak kasus seringkali ditemukan bahwa meskipun labelnya adalah kolaborasi akan tetapi praktik yang terjadi justru ada dominasi dari satu aktor ke aktor yang lainnya sehingga symbiosis mutualisme dan sinergi di antara mereka tidak terjadi. Studi-studi mengenai kolaborasi ini sudah banyak dilakukan. Namun demikian, studi yang ada belum membahas secara komprehensif mengenai dinamika dan bagaimana proses kolaborasi terjadi. Studi ini

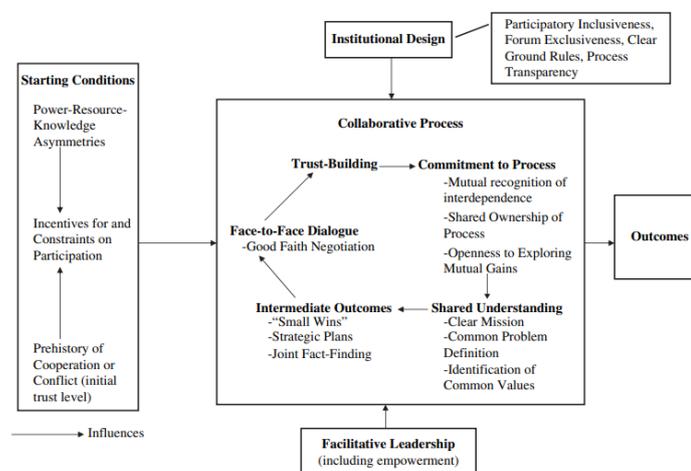
diharapkan mampu memahami dinamika aktor dan proses kolaborasi di dalam program Gandeng Gendong.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*, yaitu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis penelitian sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu. *Literature review* tidak hanya memberikan gambaran umum terhadap pengetahuan yang ada, tetapi juga mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam, memetakan kesenjangan penelitian, dan mengembangkan teori baru. Metode tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan literatur dari jurnal, artikel, dan buku untuk membangun landasan yang kuat dalam pembahasan penelitian.

Untuk memperkuat penelitian ini, teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance*, yakni sebuah sistem dinamis yang melibatkan berbagai pihak dari sektor berbeda untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama melalui pemahaman dan membangun kepercayaan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Dalam pandangan Ansell and Gash (2008), *Collaborative Governance* merupakan serangkaian pengaturan yang dilakukan oleh suatu lembaga publik melibatkan *stakeholder non-state* dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi secara konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset yang ada. Dalam teorinya terdapat lima indikator dalam proses kolaborasi yakni: (1) Dialog tatap muka, (2) Membangun kepercayaan, (3) Komitmen dalam proses, (4) Pemahaman bersama, dan (5) Hasil sementara.

Gambar 3. Model *Collaborative Governance* Dalam Adopsi Teori Ansell dan Gash



Sumber: (Astuti & Warsono, 2020)

Gambar 3 memberikan representasi visual dari temuan dalam buku. Modelnya memiliki empat variabel luas yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel luas tersebut dapat dipecah lagi menjadi variabel-variabel yang lebih rinci. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti model, sebagai permulaan kondisi, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan direpresentasikan sebagai variabel penting kontribusi atau konteks pada proses kolaboratif. Kondisi awal menentukan garis dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau liabilitas selama kolaborasi. Desain kelembagaan menetapkan aturan-aturan dasar yang mendasari kolaborasi tempat. Dan, kepemimpinan memberikan mediasi dan fasilitasi yang penting untuk kolaborasi proses. Proses kolaboratif itu sendiri sangat berulang dan nonlinier, dan oleh karena itu, kami melakukan hal yang sama merepresentasikannya (dengan banyak penyederhanaan) sebagai sebuah siklus. Sisa artikel ini menjelaskan masing-masing variabel tersebut secara lebih rinci dan menarik mengeksplorasi implikasi terhadap model kontingensi tata kelola kolaboratif.

Starting Conditions

Literatur dengan jelas menyatakan bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat menyebabkan hal tersebut memfasilitasi atau menghalangi kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Bayangkan dua titik awal yang sangat berbeda. Di satu sisi, para pemangku kepentingan mempunyai sejarah perpecahan yang sengit atas beberapa isu lokal yang bermuatan emosional dan telah mempertimbangkan masing-masing isu tersebut orang lain sebagai musuh yang tidak bermoral. Di sisi lain, para pemangku kepentingan mempunyai visi bersama mengenai hal apa mereka ingin mencapainya melalui kolaborasi dan sejarah kerja sama masa lalu dan saling menghormati. Dalam kedua kasus tersebut, kolaborasi mungkin sulit dilakukan, namun kasus pertama harus mengatasi masalah ketidakpercayaan, rasa tidak hormat, dan antagonisme yang terang-terangan. kondisi awal terdapat ke tiga variabel besar seperti ketidakseimbangan kekuasaan sumber daya pengetahuan, insentif dan kendala partisipasi, dan prasejarah kerjasama atau konflik (tingkat kepercayaan awal).

Institutional Design

Desain kelembagaan di sini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar. Partisipasi luas tidak hanya ditoleransi tetapi harus diupayakan secara aktif. Misalnya, menemukan bahwa

kolaborasi yang sukses menaruh perhatian besar pada perolehan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan pengecualian terhadap pemangku kepentingan penting adalah alasan utamanya kegagalan. Namun seperti yang kita lihat sebelumnya, pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki insentif untuk berpartisipasi, terutama jika mereka melihat cara-cara alternatif untuk mewujudkan agenda mereka. Desain kelembagaan ini tentu berkaitan dengan *participatory inclusiveness, forum exclusiveness, clear ground rules, dan process transparency*.

The Collaborative Process

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Model kolaborasi panggung penting untuk menarik perhatian terhadap perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks. Kolaborasi sering kali tampaknya bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil sementara.

1. *Face to Face Dialogue*: Seluruh tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, maka “komunikasi yang kental” yang diperbolehkan melalui dialog langsung adalah hal yang sama penting bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang demi keuntungan bersama. Namun, tatap muka Dialog lebih dari sekedar media negosiasi. Ini adalah inti dari proses meruntuhkan stereotip dan hambatan komunikasi lainnya yang menghalangi eksplorasi keuntungan bersama di tempat pertama (Bentrup 2001). Hal ini merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, berbagi pemahaman, dan komitmen terhadap proses tersebut.
2. *Trust Building*: Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan merupakan titik awal umum bagi tata kelola kolaboratif. Proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Padahal, sudah ada prasejarah antagonisme di antara para pemangku kepentingan, ditemukan bahwa membangun kepercayaan sering kali menjadi hal yang paling menonjol aspek dari proses kolaboratif awal dan bisa sangat sulit untuk dikembangkan. Hal ini tidak berarti bahwa membangun kepercayaan merupakan fase yang terpisah dari pembangunan kepercayaan dialog dan negosiasi mengenai hal-hal substantif. Namun para pemimpin kolaboratif yang baik menyadari bahwa mereka

harus membangun kepercayaan di antara para penentang sebelum para pemangku kepentingan dapat melakukannya manipulasi risiko.

3. *Commitment to Process*: Meskipun terminologi yang digunakan cukup bervariasi dalam literatur, studi kasus menunjukkan bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan karena lemahnya komitmen masyarakat lembaga-lembaga untuk berkolaborasi, khususnya di tingkat kantor pusat, sering dipandang sebagai sesuatu yang khusus masalah.
4. *Shared Understanding*: Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama atau penyelarasan nilai-nilai inti. Pemahaman bersama juga bisa berarti kesepakatan pada definisi masalah.
5. *Intermediate Outcomes*: sebagai hal yang penting dalam proses hasil sementara untuk membangun momentum yang dapat membawa kesuksesan kolaborasi. Kemenangan kecil ini dapat menjadi masukan bagi proses kolaboratif dan memberikan semangat siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen.

Selanjutnya, metodologi pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Dinamika Aktor Dalam *Collaborative Governance* (Studi Kasus: Program Gandeng Gendong Di Yogyakarta) dilakukan dengan pengumpulan data melalui mekanisme sebagai berikut:

1. *Desk Study* dilakukan pengumpulan data melalui buku-buku literatur untuk mendukung penguatan dari sisi teoritisasi dan penguatan analisis data yang dilakukan.
2. Pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari laporan hasil-hasil penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan yakni Gandeng Gendong di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi

Aktor-aktor yang Terlibat dalam Program Gandeng Gendong:

Program Gandeng Gendong melibatkan berbagai aktor penting yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di Kota Yogyakarta. Kolaborasi yang erat antara kampus, korporasi, pemerintah, kampung, dan komunitas ini menjadi fondasi kuat untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Peran dari program tersebut tidak sebatas sarana pemberdayaan

masyarakat, tetapi juga menjadi model kolaborasi multisektor yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program, kolaborasi antara berbagai pihak di Kota Yogyakarta memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Pemerintah Kota Yogyakarta berfungsi sebagai fasilitator utama dan pembuat kebijakan yang memiliki tanggung jawab besar dalam merancang regulasi yang mendukung kelancaran program. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana serta fasilitas yang dibutuhkan, sekaligus menjadi penghubung utama antara berbagai sektor untuk memastikan keberlanjutan program tersebut (Afriansyah & Dkk, 2023). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat.

Sebagai contoh di tingkat lokal, Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta memiliki peran penting sebagai penyelenggara yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Kelurahan tidak hanya berperan dalam mengorganisasi kelompok masyarakat, tetapi juga memberikan bimbingan teknis yang dibutuhkan kelompok sasaran agar dapat menjalankan program dengan efektif. Selain itu, kelurahan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mobilisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal, yang menjadi dasar dari keberhasilan program ini (Zulkarnain, 2018; Miftakhul & Dwi, 2021). Tanpa keterlibatan aktif kelurahan, program ini akan kesulitan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Kelompok Gandeng Gendong, sebagai kelompok sasaran utama, menjadi subjek yang sangat terlibat dalam seluruh proses program ini. Mereka bertanggung jawab atas inovasi produk, pengelolaan usaha, dan pemenuhan target pasar yang telah ditetapkan. Mayoritas anggota kelompok ini berasal dari keluarga miskin atau rentan, yang menjadikan mereka sebagai penerima manfaat langsung dari program pemberdayaan ini. Keberhasilan kelompok ini dalam memproduksi dan memasarkan produk akan sangat mempengaruhi dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan makanan, distributor, dan pemasok bahan baku, memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pasar produk yang dihasilkan oleh kelompok Gandeng Gendong. Mereka tidak hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan informasi pasar yang berguna untuk pengembangan produk. Akses pemasaran yang diberikan oleh sektor swasta, baik di tingkat lokal maupun

secara daring, sangat penting untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan daya saing produk di pasar.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) juga memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan program ini. Mereka mendampingi masyarakat dengan memberikan pelatihan dalam manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran, sehingga kelompok sasaran dapat mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Selain itu, LSM dan NGO berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta, serta mendukung pemberdayaan kelompok melalui penguatan kapasitas mereka.

Akademisi dan peneliti turut memberikan kontribusi yang signifikan melalui penelitian dan evaluasi berbasis data untuk memastikan program berjalan dengan baik. Mereka memiliki peran vital dalam menganalisis dampak program, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program di masa depan. Dengan menggunakan data dan temuan penelitian, akademisi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategi yang lebih tepat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran.

Terakhir, media memiliki peran yang tak kalah penting dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini. Melalui kampanye sosial dan diseminasi informasi, media mendukung akses pasar bagi produk yang dihasilkan oleh kelompok Gandeng Gendong, serta membantu menyebarkan pesan positif tentang keberhasilan program tersebut kepada masyarakat luas. Media juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keberlanjutan dan dampak sosial dari program ini, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap program.

Peta Dinamika Aktor

Peta dinamika aktor dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat mencerminkan interaksi yang kompleks di antara berbagai pihak yang memiliki peran dan pengaruh berbeda. Pemerintah memegang peran dominan dalam hal kebijakan dan pendanaan, memberikan arah strategis serta sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran program. Namun, keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antara pemerintah dan aktor-aktor lain, seperti kelurahan dan sektor swasta, yang memainkan peran pelengkap di tingkat operasional. Tanpa sinergi yang kuat, kebijakan yang baik pun akan sulit terwujud dalam tindakan yang konkret di lapangan.

Kelurahan memiliki posisi yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai aktor lokal, Kelurahan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan

dan melaksanakan program di tingkat masyarakat. Meskipun pengaruh kelurahan dalam pengambilan keputusan terbatas, keberadaan mereka yang dekat dengan masyarakat menjadikan mereka sebagai fasilitator yang sangat vital dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Mereka mengatur logistik dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meskipun kendala dan tantangan lokal seringkali memengaruhi efektivitasnya.

Kelompok Gandeng Gendong adalah aktor utama dalam pelaksanaan program, yang langsung terlibat dalam produksi dan pemasaran produk. Mereka memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan aktivitas ekonomi program dan menjadi subjek utama yang merasakan dampak langsung dari program pemberdayaan ini. Meskipun kelompok ini memiliki inisiatif dan kreativitas dalam mengelola usaha, mereka masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan LSM untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang dari program tersebut. Dengan kata lain, kelompok ini menjadi ujung tombak, namun tetap membutuhkan kolaborasi untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pasar dan jaringan distribusi produk yang dihasilkan oleh kelompok Gandeng Gendong. Sebagai penyedia akses pasar yang lebih luas, sektor swasta berperan besar dalam memastikan kelancaran ekonomi program, terutama terkait dengan penyediaan bahan baku dan saluran distribusi yang efektif. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional program, kontribusi mereka terhadap keberlanjutan ekonomi program tidak bisa dipandang sebelah mata, karena mereka memberikan fondasi bagi pengembangan pasar yang dibutuhkan oleh produk-produk yang dihasilkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memiliki peran sebagai fasilitator dan pemberdaya, memberikan pelatihan serta mendukung penguatan kapasitas kelompok sasaran. Meskipun mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan utama dalam program, kehadiran mereka sangat penting dalam membimbing kelompok masyarakat untuk mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Peran mereka dalam membangun kapasitas lokal dan memberikan pendampingan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kesuksesan jangka panjang program ini, meskipun pengaruh mereka lebih bersifat pembimbing daripada pengambil keputusan.

Akademisi dan peneliti memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data yang objektif dan rekomendasi berbasis riset untuk evaluasi program. Mereka tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan operasional atau kebijakan, namun kontribusi mereka dalam menyediakan informasi berbasis data memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program secara lebih terarah. Melalui riset dan analisis yang mendalam, akademisi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga menjadi landasan penting bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Media memainkan peran yang tidak kalah penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini. Mereka berperan dalam diseminasi informasi dan kampanye sosial yang dapat menarik perhatian masyarakat terhadap keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam program. Meskipun media memiliki pengaruh besar dalam membangun citra positif dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi, mereka tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan operasional atau kebijakan program. Peran mereka lebih kepada penyebaran informasi yang dapat memperluas jangkauan dan dukungan terhadap program yang dijalankan.

Analisis Peran dan Dominasi Aktor:

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dominasi yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait program Gandeng Gendong, terutama melalui kendalinya atas sumber daya dan kebijakan strategis. Dominasi ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan program serta mengalokasikan anggaran yang relevan. Salah satu inisiatif utama dalam program ini adalah penggunaan aplikasi *Nglarisi*, yang memungkinkan instansi pemerintah memesan konsumsi rapat langsung dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Inisiatif ini membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi UMKM lokal, sehingga memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, absennya kejelasan dan ketegasan dalam regulasi mekanisme pelaksanaan program telah menimbulkan disonansi koordinasi di antara para aktor (Chinda & Harsono, 2024). Hal ini menegaskan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih terstruktur dan adaptif untuk memfasilitasi kolaborasi lintas aktor secara optimal.

Dalam konteks ini, peran kelurahan muncul sebagai penghubung yang krusial antara pemerintah dan kelompok Gandeng Gendong. Meskipun kelurahan tidak memiliki otoritas politik yang sebanding dengan pemerintah pusat, mereka berfungsi sebagai fasilitator yang menjaga kelangsungan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Terlepas dari minimnya akses terhadap sumber daya yang melimpah, kelurahan memegang peranan penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat

lokal. Kapasitas kelurahan untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan produktif memperlihatkan potensinya sebagai agen mediasi dalam kerangka tata kelola kolaboratif.

Selanjutnya, kelompok Gandeng Gendong memainkan peran sentral sebagai entitas pelaksana utama program di tingkat masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui tanggung jawab mereka dalam mengoperasionalkan inisiatif yang mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan inisiatif *Nglarisi*, penelitian Novi Ulva Anggreini (2021) menunjukkan bahwa faktor modal usaha, bahan baku, dan jumlah penjualan secara simultan memengaruhi pendapatan kelompok UMKM *Nglarisi*. Dengan menggunakan aplikasi *Nglarisi*, UMKM memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar mereka, tetapi keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan fasilitas, pelatihan, dan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah maupun kelurahan. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural yang memerlukan strategi penguatan kapasitas, agar kelompok ini dapat bergerak menuju kemandirian operasional. Dengan demikian, kesinambungan peran mereka sebagai pelaksana dapat terjamin.

Melengkapi peran aktor-aktor utama, sektor swasta dan LSM hadir sebagai mitra strategis yang memberikan kontribusi substansial, terutama dalam bidang pemasaran dan pendampingan teknis. Dukungan mereka membantu meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di komunitas sasaran. Namun, mereka lebih berfungsi sebagai pelengkap daripada pengambil keputusan strategis, karena keterbatasan mereka dalam memengaruhi kebijakan atau pendanaan program. Oleh karenanya, kontribusi mereka harus dipandang sebagai bagian dari upaya kolektif yang memperkaya ekosistem kolaborasi.

Peran korporasi dalam program Gandeng Gendong juga menunjukkan dinamika yang signifikan, salah satu contohnya dapat dilihat dari keterlibatan CV. Trimatra sebagai aktor dominan dalam penyusunan masterplan di Kelurahan Gedongkiwo. Kecamatan Mantrijeron. Pihak tersebut juga memimpin berbagai tahapannya, mulai dari sosialisasi, wawancara, hingga penyusunan dokumen akhir. Dengan mengontrol anggaran dan mengarahkan proses penyusunan, CV. Trimatra memainkan peran penting dalam memastikan masterplan dapat dirancang secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keterlibatan yang dominan ini juga menimbulkan ketergantungan teknis, sementara peran masyarakat sebagai stakeholder sering kali terpinggirkan. Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk menciptakan kolaborasi yang seimbang di antara semua aktor.

Di sisi lain, akademisi dan media memberikan dimensi intelektual dan sosial yang berharga terhadap program Gandeng Gendong. Akademisi mendukung pengembangan program melalui penelitian empiris yang menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan efektivitas program. Sementara itu, media memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik yang positif. Peran mereka, meskipun tidak langsung terkait dengan keputusan teknis atau operasional, memberikan legitimasi sosial dan intelektual yang memperkuat fondasi keberlanjutan program secara menyeluruh.

Adapun contoh dari peranan kampus dalam program ini dapat dilihat dari berbagai produk penelitian dari perguruan tinggi yang diserahkan kepada kelompok sasaran yang relevan. Seperti pengembangan alat pencacah dan pemusnah sampah yang diciptakan oleh tim peneliti dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dalam penelitian berjudul “Mekanisme Pemusnahan Sampah Kota Tanpa Pilah Pilih.” Alat tersebut diserahkan kepada Ketua LPMK Kelurahan Sorosutan untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat lokal. Sementara itu, tim peneliti dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menciptakan alat pengolah limbah detergen melalui penelitian “Pengolahan Limbah Detergen dengan Metode *Constructed Wetland* Menggunakan Tanaman *Echinodorus Radicans* di Kota Yogyakarta.” Hasil penelitian tersebut diserahkan kepada Kelompok Pengrajin Jumputan Ibu Sejahtera di Kelurahan Tahunan, memberikan solusi atas masalah limbah yang relevan dengan kebutuhan komunitas tersebut. Begitu pula dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, berkontribusi melalui inovasi alat pengukur lubang jalan dalam penelitian berjudul “*Amarto (Damaged Road Detector)*: Purwarupa Sistem Deteksi dan Analisator Kerusakan Jalan Raya Kota Yogyakarta Menggunakan Kamera Kinect dan GPS.” Alat tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk mendukung pengelolaan infrastruktur kota. Kontribusi dari berbagai universitas ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis tetapi juga membuktikan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan program.

Pembahasan

Elemen-elemen dalam kerangka teori ini meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Berikut penjelasan dari hasil temuan yang terkait dengan elemen-elemen tersebut:

1. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash, memiliki kunci penting berupa dialog tatap muka antaraktor. Dialog ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih

mendalam antar aktor, memperbaiki komunikasi, dan membangun kepercayaan. Adapun hasil temuan yang didapatkan, dialog ini telah terjadi. hal tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mengetahui adanya program ini dan ikut andil (Miftakhul & Dwi, 2021).

2. Membangun Kepercayaan (*Building Trust*)

Ansell dan Gash menekankan bahwa kepercayaan antar aktor yang terlibat sangat penting dalam kolaborasi yang berhasil. Kepercayaan akan memudahkan kerja sama dan memungkinkan terciptanya solusi yang lebih efektif. Hasil Temuan yang didapatkan secara keseluruhan dari masing-masing aktor pada penelitian milik (Linda & Dkk, 2024) yakni Kepercayaan antar aktor dalam Program Gandeng Gendong menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terutama antara kelompok Gandeng Gendong dan kelurahan, hubungan mereka telah didasarkan pada kepercayaan yang saling menguntungkan, di mana kelurahan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada kelompok tersebut. Namun, kepercayaan antara kelompok Gandeng Gendong dan pemerintah daerah masih perlu diperbaiki. Kelompok merasa terkadang kurang diberdayakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan anggaran, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Selain itu yang perlu ditingkatkan juga yakni standar operasional prosedur (SOP), pelibatan pelaku media massa, pembentukan badan yang bertugas mengkoordinasikan.

3. Komitmen pada Proses (*Commitment to the Process*)

Komitmen pada proses adalah elemen yang ditekankan oleh Ansell dan Gash, yang menunjukkan bahwa semua pihak harus berkomitmen terhadap proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen ini diperlukan agar setiap aktor tetap aktif berpartisipasi meskipun terdapat hambatan.

Hasil Temuan yang didapatkan secara keseluruhan dari masing-masing aktor pada penelitian milik (Nugraha & Angeningsih, 2022) yakni Komitmen terhadap proses terlihat dari partisipasi aktif kelompok Gandeng Gendong yang terus berusaha mengatasi tantangan dalam usaha mereka meskipun terkadang menghadapi hambatan. Mereka berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha mereka dengan menyediakan makanan dan *snack* yang dapat dijual secara *online* maupun di kelurahan dan kampus. Selain itu, pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen pada membangun fasilitasnya sampai ke perencanaan pembuatannya, kampus ikut turut andil dalam membantu penelitian di lokasi tersebut apakah layak untuk mendukung program tersebut, dari pihak korporasi membantu dengan CSRnya serta membantu kelengkapan-kelengkapannya, dari komunitas dan kampung menyediakan fasilitas seperti

UMKM/UKM dan lainnya yang menjadi potensi untuk mendukung atau menyelaraskan program gandeng gendong.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Ansell dan Gash menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan pemahaman bersama mengenai tujuan, harapan, dan hasil yang diinginkan oleh semua aktor yang terlibat. Pemahaman bersama ini akan membantu menghindari ketidakpastian dan meningkatkan keefektifan kolaborasi. **Hasil Temuan** yang didapatkan secara keseluruhan dari masing-masing aktor yakni dalam Program Gandeng Gendong, ada pemahaman bersama mengenai tujuan utama program yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi. Kelompok Gandeng Gendong, kelurahan, dan pemerintah sepakat untuk membangun sebuah usaha yang dapat mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹.

5. Hasil Sementara (*Interim Results*)

Ansell dan Gash mengemukakan bahwa hasil sementara dalam kolaborasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Hasil sementara juga digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan akhir masih dapat tercapai. Hasil Temuan yang didapatkan secara keseluruhan dari masing-masing aktor pada penelitian milik (Kautsar, 2021) yakni hasil sementara dari Program Gandeng Gendong menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Sejumlah kelompok telah berhasil menjual produk mereka melalui berbagai saluran, termasuk online dan di kelurahan. Meskipun demikian, kelompok masih menghadapi beberapa tantangan terkait akses pasar dan keterbatasan sumber daya.

Program Gandeng Gendong terhadap *Community Capacity Building*

Gambar 5. Pembinaan E-Nglarisi Kelompok Gandeng Gendong



¹ <https://dalbang.jogjakota.go.id/detail/index/101>

Pembangunan kapasitas masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam komunitas untuk memanfaatkan sumber daya dan membangun struktur sosial yang efektif guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama (Chaskin, 2001). Keikutsertaan aktif dari anggota komunitas sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam proses ini. Selain itu, penguatan kepemimpinan lokal berperan krusial dalam mendorong warga untuk berinisiatif dan memimpin kegiatan kolektif yang mendukung perubahan positif di masyarakat (Chaskin, 2001).

Community Capacity Building (Pembangunan kapasitas komunitas) dalam konteks Program Gandeng Gendong di Yogyakarta berfokus pada memperkuat kemampuan komunitas untuk mengelola dan mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang mereka hadapi. Program Gandeng Gendong tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengatasi kesulitan. Beberapa bentuk *Community Capacity Building* dalam program Gandeng Gendong yakni:

1. Pelatihan dan pemberdayaan Ekonomi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Sebagai contoh: Pelatihan rencana bisnis, pemasaran, pengemasan, dan pengelolaan alokasi dana.
2. Menciptakan produk lokal seperti kerajinan tangan dan usaha mikro yang ramah lingkungan
3. Pelatihan teknologi informasi dan digital marketing tidak lupa diberikan agar mempermudah pemasaran.

Adapun Indikator keberhasilan *Community Capacity Building* sebagai berikut:

1. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat yang aktif
2. Rasa kepemilikan dan solidaritas sosial
3. Peningkatan kesejahteraan secara kolektif
4. Dampak sosial positif dan keberlanjutan

Salah satu contoh kelurahan yang mana masterplan nya dianggap kurang efektif untuk menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gedongkiwo. Hal ini dikarenakan masterplan Kelurahan Gedongkiwo belum melibatkan seluruh stakeholder yang ada termasuk masyarakat dan komunitas-komunitas yang ada di Gedongkiwo. Waktu yang singkat dalam penyusunannya memungkinkan jadi penyebab kurang maksimalnya masterplan Kelurahan Gedongkiwo. Selain itu gagalnya monev di tahun 2022 menyebabkan belum adanya revisi dari masterplan Kelurahan Gedongkiwo (Maulana & Ahdiyana, 2023).

Sedangkan, salah satu kelurahan yang dianggap sudah berjalan dengan baik dalam program gandeng gendong yakni di Kelurahan Giwangan terdapat UMKM yang bernama Gandeng Gendong, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Gandeng Gendong program dari Pemkot Yogyakarta, di Kelurahan Giwangan ada 6 kelompok Gandeng Gendong. Disitu 1 kelompok terdiri 10 anggota, artinya 10 kali 6 kelompok gandeng gendong perempuan semuanya².

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dalam konteks *Collaborative Governance*, berikut adalah aktor-aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong di Yogyakarta dan peran mereka dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (*Community Capacity Building*):

1. Kelompok Program Gandeng Gendong

Dominasi: dapat dikatakan *Moderate* karena Kelurahan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam implementasi program di tingkat lokal, namun kewenangannya terbatas oleh kebijakan dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah (Rasyid & Suparjan, 2020).

2. Kelurahan

Dominasi: Dapat dikatakan dominan karena Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya yang besar dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang menentukan arah program, serta memiliki akses terhadap anggaran publik dan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh kelompok sasaran (Izzaturrahmah & Dkk, 2023).

3. Sektor Swasta / Pihak Swasta (Sponsor, Distributor, dll.)

Dominasi: Tidak dominan dalam aspek pengambilan keputusan lokal, tetapi memiliki pengaruh besar dalam keberlanjutan ekonomi program, terutama dalam hal pemasaran produk dan akses pasar yang lebih luas.

4. Masyarakat Umum (Warga Sekitar dan Pembeli)

Dominasi: Tidak dominan secara langsung, tetapi memiliki peran penting sebagai pasar potensial dan partisipan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

5. Sektor Swasta (Perusahaan/Pengusaha Lokal)

Dominasi: Tidak dominan, namun memiliki pengaruh besar pada keberlanjutan ekonomi program melalui dukungan terhadap distribusi dan pemasaran produk, serta memberikan akses pasar yang penting.

² <https://regional.kompas.com/read/2023/10/31/160600078/kalurahan-giwangan-kota-yogyakarta-dikukuhkan-sebagai-kelurahan-ramah?page=all>.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)
Dominasi: Relatif tidak dominan, meskipun berperan penting dalam hal pendampingan, mereka tidak memiliki kewenangan langsung dalam kebijakan atau sumber daya yang mempengaruhi keputusan utama dalam program.
7. Akademisi atau Peneliti
Dominasi: Tidak dominan, karena meskipun mereka memberikan saran berbasis penelitian yang valid, mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional atau kebijakan.
8. Media
Dominasi: Tidak dominan, namun memiliki pengaruh dalam hal persepsi publik dan pengaruh sosial, yang dapat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan program.

Dinamika Aktor dalam Program Gandeng Gendong

1. Kelompok Gandeng Gendong berinteraksi dengan aktor lain seperti kelurahan, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menjalankan program pemberdayaan. Aktor-aktor ini seringkali memiliki peran saling melengkapi. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan kelompok Gandeng Gendong akan dukungan dari pihak lain untuk memperluas pasar, mendapatkan pelatihan, dan akses terhadap sumber daya.
2. Kelompok Gandeng Gendong sangat bergantung pada kelurahan untuk memperoleh akses terhadap fasilitas dan pembinaan, serta dukungan dari pemerintah daerah untuk keberlanjutan kebijakan. Sebaliknya, kelurahan dan pemerintah daerah mengandalkan kelompok Gandeng Gendong untuk menjalankan program dengan efektif di tingkat lapangan.
3. Kelompok Gandeng Gendong juga bergantung pada sektor swasta untuk akses ke pasar, terutama untuk produk yang mereka hasilkan, serta dukungan finansial untuk pengembangan usaha mereka.
4. Perbedaan Kekuasaan dan Pengaruh: Dalam hierarki kekuasaan, aktor seperti kelurahan dan pemerintah daerah memiliki pengaruh besar dalam hal keputusan kebijakan dan pendanaan, sementara kelompok Gandeng Gendong lebih berperan pada tataran pelaksanaan. Pemerintah daerah dapat mempengaruhi kelancaran program melalui kebijakan publik yang mendukung atau menghambat program tersebut.
5. Sektor swasta meskipun tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan lokal, namun mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlanjutan ekonomi program melalui akses pasar yang mereka buka untuk produk Gandeng Gendong.

6. Terkadang terjadi konflik kepentingan antar aktor, misalnya antara kelompok Gandeng Gendong dan kelurahan terkait pembagian tugas atau akses terhadap sumber daya. Kelurahan mungkin merasa terbebani dalam memberikan pendampingan, sementara kelompok Gandeng Gendong berharap lebih banyak dukungan administratif dan sumber daya.
7. Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah juga dapat menjadi sumber ketegangan, terutama ketika kelurahan atau kelompok Gandeng Gendong merasa tidak cukup mendapatkan sumber daya atau dukungan untuk menjalankan kegiatan secara optimal.

KESIMPULAN

Program Gandeng Gendong adalah program yang dirilis oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan melibatkan beberapa *stakeholder* disebut dengan 5K seperti Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas, dan Kampung. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan dari adanya program tersebut. Kelima aktor memiliki peran ataupun tupoksinya masing-masing. “Gandeng Gendong” merupakan program yang menggunakan struktur legitimasi yang bias berupa norma, nilai dan standar sosial. Pada Program Gandeng Gendong struktur tersebut dibentuk berdasarkan MoU dan memiliki forum-forum serta mekanisme kerja yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 23 Tahun 2018. Program Gandeng Gendong merupakan sebuah inovasi kebijakan melihat permasalahan yang terjadi di Yogyakarta dari segi kemiskinan dengan konsep kemitraan multipihak yang menggunakan model dari Ansell dan Gash.

Program Gandeng Gendong ini berhasil memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Namun, untuk memastikan program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas seperti halnya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Yogyakarta: Tetap meningkatkan dukungannya terkait kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, kolaborasi antarwarga, dan pembangunan berbasis komunitas. Ini dapat mencangkup alokasi dana untuk program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, jika sudah ada menerapkan pengembangan pada UMKM sebaiknya pemerintah memisahkan alokasi dana bagi UMKM dan Koperasi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan pemantauan dan evaluasi yang transparansi dengan menyediakan platform atau kanal untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang program Gandeng

Gendong secara lebih luas. Terakhir, perlu memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak kelurahan dalam program ini.

- 2) Korporasi: Perusahaan dapat menysasar sektor yang relevan dengan bisnis mereka, lebih banyak membuka pintu dalam memasarkan produk kerajinan hingga ke mancanegara jika ingin mendongkrak ekonomi dengan dukungan teknologi.
- 3) Kampus: Dapat berperan aktif dengan melibatkan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat ataupun magang dengan melibatkan dalam inovasi sosial yang lebih unggul.
- 4) Komunitas: Meningkatkan lagi partisipasi gotong royong, aktif dalam pendampingan dan pembelajaran secara kolektif, Pengembangan jaringan sosial dan ekonomi, serta mengorganisir kegiatan dalam program Gandeng Gendong.
- 5) Kampung: Melakukan upgrading penyusunan program setiap tahunnya untuk melihat kebutuhan local serta turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program Gandeng Gendong.

Terkait sinergi antara semua pihak sangatlah menjadi elemen yang penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan program Gandeng Gendong ini. Indikator yang diadopsi oleh Ansell dan Gash merupakan acuan agar *Collaborative Governance* yang dijalankan mampu memiliki dampak yang lebih serius dan berkelanjutan hingga di masa mendatang dengan tujuan melakukan pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang nantinya akan menjadi acuan kebijakan yang dapat diimplementasikan di kota lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih terkait pemahaman isi tulisan. Selain itu, Penulis tidak mendapatkan pendanaan berupa hibah atau sponsor dari manapun dalam penyusunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, & Dkk. (2023). *Pemberdayaan masyarakat* (Afriansyah (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Anggreini, N. U., & Andari, Y. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Kelompok Umkm "Nglarisi" Pada Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/195784>
- Astuti, R. S., & Warsono, H. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Az-Zahra, F. W. (2024). *Kolaborasi Pentahelix Dalam Penerapan Program Gandeng*

- Gendong Sebagai Wujud Keberlanjutan Umkm Di Kota Yogyakarta* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45931/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1587/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-maret-2024.html>
- Chaskin, R. J. (2001). Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291-323.
- Chinda, A. I., & Harsono, D. (2024). *Policy Analysis of the Gandeng-Gendong Program in Enhancing MSME Welfare in Yogyakarta City*. 02.
- Chris Ansell, Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Izzaturrahmah, N., & Dkk. (2023). *Gandeng Gendong: Poverty Reduction Program Based on Community Empowerment in Yogyakarta City*. 7(No 2), 162–176.
- Kautsar, M. N. Al. (2021). Perbaikan Model Bisnis Program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta Menggunakan Metode Service Dominant Business Model Radar.
- Linda, R. E., & Dkk. (2024). Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta). 10(April).
- Masyarakat, S. P. (2020). Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. In *Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah* (p. 5).
- Maulana, A. R., & Ahdiyana, M. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Penyusunan Masterplan Berbasis Kelurahan Dalam Program Gandeng Gendong (Studi Kasus Kelurahan Gedongkiwo, Yogyakarta). 08.
- Miftakhul, S., & Dwi, I. (2021). *Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan : Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta*. 1, 365–379.
- Nugraha, A. B., & Angeningsih, L. R. (2022). *Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta*. 3, 160–169.
- Rasyid, H., & Suparjan. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Gandeng Gendong di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta*.
- Rohman, F. A., & Suditomo, R. (2024). *[Merdeka, Tapi Masih Berjuang_ Potret Kemiskinan*

di Yogyakarta] - *EQUITAS FEB UGM*. *EQUITAS FEB UGM Bidang Kajian*
Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan.

<https://equitas.feb.ugm.ac.id/2024/08/17/merdeka-tapi-masih-berjuang-potret-kemiskinan-di-yogyakarta/>

Shrider, E. A. (2024). *Poverty in the United States: 2023. Current Population Reports*. (Issue September). <http://www.census.gov/hhes/www/poverty/poverty.html>

Tampanguma, K. S., & Dkk. (2020). *Kolaborasi Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa Lalumpe*. 1(4), 322–327.

Yogyakarta, W. (2018). *Peraturan Walikota Yogyakarta*.

Zulkarnain, M. (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa*. 11, 103–110.